



RENCANA KERJA (RENJA) 2023



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDANGAN
PROVINSI JAMBI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan Hidayah-Nya **Rencana Kerja** Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Disusunnya Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang telah disepakati, untuk dijadikan pedoman kerja tahunan guna mewujudkan tercapainya visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi. Rencana Kerja Tahun 2023 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

Secara umum, Rencana Kerja Tahun 2023 ini berisikan informasi mengenai program kerja, kegiatan disertai indikator hasil dan manfaat serta perubahan-perubahan Program-program kegiatan yang telah disesuaikan dan akan dilaksanakan pada tahun 2023, merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama 1 tahun

Dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2023 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman menyusun kegiatan prioritas Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Jambi tahun 2023.

Jambi, Januari 2023

KEPALA DINAS

Drs.H.Kemas Muhammad Fuad,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19731212 199302 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II : HASIL DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENJA.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan.....	22
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	24
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat ..	28
BAB III : TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN.....	30
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	30
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	34
3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2021 dan Analisa Capaian Kinerja.....	50
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RENJA DISPERINDAG PROVINSI JAMBI.....	80
BAB V : PENUTUP	95
LAMPIRAN	96

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Disperindag dan Pencapaian Renstra Disperindag s/d Tahun 2021	18
Tabel 2.2	: Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Jambi.....	37
Tabel 3.1	: Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi	67
Tabel 4.1	: Rumusan Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 Provinsi Jambi.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2023 merupakan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun yang telah tertuang pada rencana strategis dan berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Perumusan Program dan Kegiatan serta penganggaran menitik beratkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian sasaran pada rencana strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Rencana Kerja Tahun 2023 juga dirumuskan untuk dapat sinkron dalam rangka menunjang visi, misi kepala daerah pada tahun 2023 dengan program dan kegiatan yang mengakomodir urusan Perindustrian dan Perdagangan.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, dalam penyusunan rencana kerja tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi pada tahun 2023 dengan memperhatikan program prioritas Pemerintah Daerah untuk pencapaian sasaran Pembangunan Pemerintah Daerah pada tahun 2023. Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi 2021 – 2026.

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD yang memuat kebijakan, program, kegiatan pembangunan untuk periode satu tahun baik

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023

yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan cara mendorong partisipasi masyarakat (lampiran 6, Permendagri No. 54 Tahun 2010). Renja Disperindag Provinsi Jambi memiliki arti strategis untuk penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah. Dokumen Renja menjadi dasar bagi SKPD untuk memuat program,/kegiatan di dalam KUA dan PPAS serta rencana program,/kegiatan untuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja SKPD, adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPd.
2. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPd, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
3. Substansi Renja SKPD memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan SKPD terhadap Renstra SKPD; evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu; rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan; dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju.
4. Penyusunan program dan kegiatan SKPD untuk tahun yang direncanakan mengacu pada ketentuan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia).
5. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD.
6. Program/kegiatan dalam RKPd Provinsi dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan untuk didanai APBD Provinsi, APBN dan sumber lainnya, sedangkan untuk RKPd Kabupaten/Kota dirinci menurut sumber dana APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya.
7. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5657);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
8. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023

Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi Tahun 2013-2033;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005- 2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 ;
17. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2018 Tentang pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian dan sertifikasi mutu Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi;

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi disusun dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dan pokok dan fungsi dalam upaya mendukung visi dan misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026.

b. Tujuan

Tujuan Rencana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2023 antara lain :

- Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya dan perkiraan tahun berjalan serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas SKPD.
- Memberikan arahan dan acuan serat pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2023 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Kebijakan Daerah
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD



Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Strategi dan Kebijakan

4.2. Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Penetapan indikator kinerja sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Sementara itu indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaian kinerjanya dengan menggunakan indikator kinerja.

Kinerja dapat diartikan sebagai hasil/keluaran dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas. Pencapaian kinerja sasaran merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran organisasi, sebagaimana dituangkan dalam sasaran setiap misi.

Penilaian kinerja program/kegiatan sebagai substansi pengukuran kinerja Disperindag Provinsi Jambi Tahun 2023 adalah program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi, pada kelompok Belanja Langsung.

Penilaian kinerja program/kegiatan dilakukan dengan membandingkan capaian akumulasi kinerja program/kegiatan pada indikator kinerja program/kegiatan terhadap sasaran/target program/kegiatan yang didefinisikan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi pada tahun 2023 telah melaksanakan 10 (sepuluh) program yang tercantum dalam penetapan kinerja yang terdiri dari 2 (dua) urusan pilihan pada bidang industri dan perdagangan.

Pada Tahun 2022, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi mendapatkan Alokasi Anggaran APBD Sebesar **Rp. 29.159.609.387 (*Dupuluh Sembilan Milyar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*)** yang diarahkan untuk melaksanakan 10 (sepuluh) Program Kerja yang tercantum dalam Penetapan Kinerja dan 20 (Dua Puluh) Kegiatan, 41 (Empat Puluh satu) Sub Kegiatan. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2022.

Progres dan hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut, dari sisi keuangan terealisasi sebesar **Rp. 21.271.735.756 (*Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*)** dengan Persentase Realisasi 72,95% sedangkan yang tidak terealisasi sebesar **Rp. 7.887.873.631 (*Tujuh Milyar Delapan Ratus Delapan***

Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) atau sebanding dengan 27,05% dikarenakan Kegiatan Subsidi Inflasi Tidak dapat Terlaksana sepenuhnya di karena mampetnya pelaksanaan dikarenakan perlunya koordinasi dan validasi data yang valid untuk melaksanakan kegiatan Subsidi tersebut.

Secara Umum Pelaksana Anggaran di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi **Baik**, hal ini diindikasikan dengan tingkat Realisasi Belanja yang lumayan tinggi yaitu sebesar 72,95% dari total anggaran tahun 2022 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.1 dibawah ini .

Tabel 2.1 REKAPITULASI PELAKSANAAN ANGGARAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2022

Rencana Kerja Tahun 2022

Berdasarkan table tersebut secara umum dapat dikatakan bahwa dari 10 (sepuluh) Program yang ada Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi terdapat 20 (Dua Puluh) Kegiatan dan 41 (empat Puluh Satu) Sub Kegiatan dengan Pencapaian Realisasi anggaran sebesar *Rp. 20.758.525.898 (Dua Puluh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)* dengan Persentase Realisasi 83,39% sedangkan yang tidak terealisasi sebesar *Rp.3.404.608.492 (Tiga Milyar Empat Ratus Empat Juta Enam Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah)*.

Secara rinci realiasi anggaran dari 10 (sepuluh) Program yang ada pada dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi terdapat 20 (Dua Puluh) Kegiatan dan 41 (empat Puluh Satu) Sub Kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut ;

KODE REKENING						URAIAN						JUMLAH (Rp)		SISA ANGGARAN	(%)						
												ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN						REALISASI			
1						2						3		4		5		6			
	3.06 .	3.06.01 .	01 .	00 .	00 .	5		BELANJA DAERAH						29.003.759.386,00	21.115.885.756,00	7.887.873.630,00	72,80				
																0,00					
	3.06 .	3.06.01 .	01 .	00 .	00 .	5 .	1		BELANJA TIDAK LANGSUNG						20.932.485.992,00	13.677.396.325,00	7.255.089.667,00	65,34			
	3.06 .	3.06.01 .	01 .	00 .	00 .	5 .	1 .	1			Belanja Pegawai	12.749.985.992,00	12.456.257.225,00	293.728.767,00	97,70						
	3.06 .	3.06.01 .	01 .	00 .	00 .	5 .	1 .	3			Belanja Subsidi	8.182.500.000,00	1.221.139.100,00	6.961.360.900,00	14,92						
																0,00					
	3.07 .	3.06.01 .	01 .						BELANJA LANGSUNG						8.071.273.394,00	7.438.489.431,00	632.783.963,00	92,16			

[illegible]

3.07 . 3.06.01 . 01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1						Belanja Barang dan Jasa	58.789.750,00	56.592.818,00	2.196.932,00	96,26
									0,00	
3.07 . 3.06.01 . 01 . 05 . 09						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	101.895.000,00	41.788.884,00	60.106.116,00	41,01
									0,00	
3.07 . 3.06.01 . 01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 1						Belanja Barang dan Jasa	101.895.000,00	41.788.884,00	60.106.116,00	41,01
									0,00	
3.07 . 3.06.01 . 01 . 06						Administrasi Umum Perangkat Daerah	711.723.727,00	645.754.981,00	65.968.746,00	90,73
									0,00	
3.07 . 3.06.01 . 01 . 06 . 01						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.983.000,00	49.580.000,00	403.000,00	99,19
									0,00	
3.07 . 3.06.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1						Belanja Barang dan Jasa	49.983.000,00	49.580.000,00	403.000,00	99,19
									0,00	
3.07 . 3.06.01 . 01 . 06 . 02						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.549.663,00	113.752.710,00	1.796.953,00	98,44
3.07 . 3.06.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1						Belanja Barang dan Jasa	115.549.663,00	113.752.710,00	1.796.953,00	98,44
									0,00	
3.07 . 3.06.01 . 01 . 06 . 05						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.534.000,00	35.507.500,00	15.026.500,00	70,26
3.07 . 3.06.01 . 01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1						Belanja Barang dan Jasa	50.534.000,00	35.507.500,00	15.026.500,00	70,26
									0,00	
3.07 . 3.06.01 . 01 . 06 . 06						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.027.660,00	6.950.940,00	76.720,00	98,91

Rencana Kerja Tahun 2022										Belanja Barang dan Jasa	7.027.660,00	6.950.940,00	76.720,00	98,91
													0,00	
3.07 . 3.06.01 . 01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	488.629.404,00	439.963.831,00	48.665.573,00	90,04
													0,00	
3.07 . 3.06.01 . 01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1										Belanja Barang dan Jasa	488.629.404,00	439.963.831,00	48.665.573,00	90,04
													0,00	
3.07 . 3.06.01 . 01 . 07										Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95.850.000,00	88.680.000,00	7.170.000,00	92,52
													0,00	
													0,00	
3.07 . 3.06.01 . 01 . 07 . 06										Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.850.000,00	88.680.000,00	7.170.000,00	92,52
3.07 . 3.06.01 . 01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 3										Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.850.000,00	88.680.000,00	7.170.000,00	92,52
													0,00	
3.07 . 3.06.01 . 01 . 08										Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	571.488.797,00	473.312.089,00	98.176.708,00	82,82
													0,00	
													0,00	
3.07 . 3.06.01 . 01 . 08 . 01										Penyediaan Jasa Surat Menyurat	73.600.000,00	66.100.000,00	7.500.000,00	89,81
3.07 . 3.06.01 . 01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1										Belanja Barang dan Jasa	73.600.000,00	66.100.000,00	7.500.000,00	89,81
													0,00	
3.07 . 3.06.01 . 01 . 08 . 02										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.168.797,00	295.666.171,00	54.502.626,00	84,44
													0,00	

3.07 . 3.06.01 . 01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1						Belanja Barang dan Jasa	350.168.797,00	295.666.171,00	54.502.626,00	84,44
									0,00	
3.07 . 3.06.01 . 01 . 08 . 04						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	147.720.000,00	111.545.918,00	36.174.082,00	75,51
3.07 . 3.06.01 . 01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 1						Belanja Barang dan Jasa	147.720.000,00	111.545.918,00	36.174.082,00	75,51
									0,00	
3.07 . 3.06.01 . 01 . 09						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	395.070.000,00	393.938.900,00	1.131.100,00	99,71
									0,00	
									0,00	
3.07 . 3.06.01 . 01 . 09 . 01						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	358.120.000,00	356.990.300,00	1.129.700,00	99,68
									0,00	
									0,00	
3.07 . 3.06.01 . 01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1						Belanja Barang dan Jasa	358.120.000,00	356.990.300,00	1.129.700,00	99,68
									0,00	
3.07 . 3.06.01 . 01 . 09 . 06						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.950.000,00	36.948.600,00	1.400,00	100,00
3.07 . 3.06.01 . 01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 1						Belanja Barang dan Jasa	36.950.000,00	36.948.600,00	1.400,00	100,00
									0,00	
3.07 . 3.06.01 . 01 . 15						Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	2.290.779.545,99	2.151.023.210,00	139.756.335,99	93,90
									0,00	
									0,00	
3.07 . 3.06.01 . 01 . 15 . 02						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	63.331.650,00	62.024.275,00	1.307.375,00	97,94
									0,00	

[illegible]

[illegible]

3.06 . 3.06.01 . 01 . 22 . 03							Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	88.276.100,00	87.545.040,00	731.060,00	99,17
										0,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1							Belanja Barang dan Jasa	88.276.100,00	87.545.040,00	731.060,00	99,17
										0,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 23							Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	199.420.000,00	199.042.250,00	377.750,00	99,81
										0,00	
										0,00	
										0,00	
										0,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 23 . 05							<i>Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor</i>	199.420.000,00	199.042.250,00	377.750,00	99,81
3.06 . 3.06.01 . 01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1							Belanja Barang dan Jasa	199.420.000,00	199.042.250,00	377.750,00	99,81
										0,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 24							Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	472.903.689,00	464.441.290,00	8.462.399,00	98,21
										0,00	
										0,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 24 . 01							<i>Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen</i>	189.885.140,00	183.883.024,00	6.002.116,00	96,84
										0,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1							Belanja Barang dan Jasa	189.885.140,00	183.883.024,00	6.002.116,00	96,84
										0,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 24 . 03							<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen</i>	283.018.549,00	280.558.266,00	2.460.283,00	99,13
										0,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 24 . 03 . 5 . 2							Belanja Barang dan Jasa	283.018.549,00	280.558.266,00	2.460.283,00	99,13

[illegible]

2.1.1 Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

I. 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

3.30.02.1.03 Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar

3.30.02.1.03.02 Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar **Rp. 40.363.650** dengan Realisasi anggaran sebesar **Rp. 38.641.550** Atau dengan persentase sebesar **95,73%** terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 1.722.100** dengan indikator Programnya adalah Jumlah pemeriksaan sarana distribusi bahanberbahaya, capaian Indikator Program berdsasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100% :

- a. Jumlah pemeriksaan sarana distribusi bahanberbahaya selama 1 tahun memperoleh output sebesar 99.73%

II. 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

3.30.03.1.01 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas

3.30.03.1.01.03 Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran semula sebesar **Rp. 31.339.000** dengan indikator Programnya adalah jumlah fasilitasi pendampingan pelaksanaan lelang agro direvisi pada RKA Perubahan menjadi tidak ada kegiatan dikarenakan Adanya Covid-19 yang masih merajalela. Sehingga kegiatan diperkirakan tidak dapat terlaksana. Sehingga target yang di pasang direvisi menjadi 0

III. 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

3.30.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

3.30.04.1.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar **Rp. 139.311.446** dengan Realisasi anggaran sebesar **Rp. 135.877.780** Atau dengan persentase sebesar **97,54%** terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 3.433.666** dengan indikator Programnya adalah Jumlah Dokumen Prognosa capaian Indikator Program berdsasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100% :

- a. Jumlah Dokumen Prognosa selama 1 tahun memperoleh ouput sebesar 97,54%

3.30.04.1.02.02 Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. **111.605.680** dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. **110.402.680** Atau dengan persentase sebesar **98,92%** terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 1.203.000** dengan indicator Programnya adalah Jumlah Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang dilaksanakan, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100% :

- b. Jumlah Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang dilaksanakan selama 1 tahun memperoleh output sebesar 98,92%

3.30.04.1.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya

3.30.04.1.03.01 Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. **193.562.012** dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. **185.085.112** Atau dengan persentase sebesar **95,62%** terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 8.476.900** dengan indicator Programnya adalah Jumlah Izin Perdagangan pupuk dan pestisida yang disupervisi, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100% :

3.30.04.1.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. **24.286.700** dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. **22.953.400** Atau dengan persentase sebesar **94,51%** terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 1.333.300** dengan indicator Programnya adalah Jumlah Distributor yang diawasi, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100% :

IV. 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

3.30.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi

3.30.05.1.01.03 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. **135.077.580**, dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. **127.339.450** Atau dengan persentase sebesar **94,27%** terdapat

Rencana Kerja Tahun 2022

sisa anggaran sebesar **Rp. 7.738.130** dengan indicator Programnya adalah Jumlah Mou Misi Dagang, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100% :

V. 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

3.30.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

3.30.06.1.01.01 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. **86.950.323**, dengan Realisasi anggaran sebesar **Rp. 84.291.299** Atau dengan persentase sebesar **96,94%** terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 2.659.024** dengan indicator Programnya adalah jumlah sosialisasi kebijakan perlindungan konsumen, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100% :

3.30.06.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. **238.620.000**, dengan Realisasi anggaran sebesar **Rp. 216.426.000** Atau dengan persentase sebesar **90,70%** terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 22.194.000** dengan indicator Programnya adalah jumlah fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100% :

3.30.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

3.30.06.1.02.01 Verifikasi Mutu Produk

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. **73.937.016**, dengan Realisasi anggaran sebesar **Rp. 71.105.470** Atau dengan persentase sebesar **96,17%** terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 2.831.546** dengan indicator Programnya adalah Jumlah kab/kota yang dikunjungi, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100% :

3.30.06.1.02.02 Pengembangan Layanan Pengujian

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. **324.099.844**, dengan Realisasi anggaran sebesar **Rp. 322.048.250** Atau dengan persentase sebesar **99,37%** terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 2.051.594** dengan indicator Programnya adalah Jumlah Jasa Pelayanan Pengujian, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100% :

3.30.06.1.02.03 Pengembangan Layanan Sertifikasi

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. **0**, dengan Realisasi anggaran sebesar **Rp. 0** Atau dengan persentase sebesar **0%** terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 0** dengan

Rencana Kerja Tahun 2022

indicator Programnya adalah Jumlah Bimbingan atau Pendampingan Pembentukan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro), capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100% :

3.30.06.1.02.04 Pengembangan Layanan Kalibrasi

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. **218.319.800**, dengan Realisasi anggaran sebesar **Rp. 211.492.245** Atau dengan persentase sebesar **96,87%** terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 6.827.555** dengan indicator Programnya adalah Jumlah alat standar laboratorium kalibrasi yang Terkalibrasi, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100% :

3.30.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

3.30.06.1.03.01 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. **199.674.000**, dengan Realisasi anggaran sebesar **Rp. 191.145.000** Atau dengan persentase sebesar **95,73%** terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 8.529.000** dengan indicator Programnya adalah Jumlah alat standar laboratorium kalibrasi yang Terkalibrasi, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100% :

VI. 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

3.30.07.1.01 Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri

3.30.07.1.01.01 Fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. **86.643.500**, dengan Realisasi anggaran sebesar **Rp. 79.588.400** Atau dengan persentase sebesar **91,86 %** terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 7.055.100** dengan indicator Programnya adalah jumlah pameran dalam negeri yang diikuti, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100% :

3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

VII. 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

3.31.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3.31.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja Tahun 2022

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. **193.344.860**, dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. **189.363.850** Atau dengan persentase sebesar **97,94 %** terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 3.981.010** dengan indicator Programnya adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100% :

3.31.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. **81.309.350**, dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. **78.361.150** Atau dengan persentase sebesar **96,37 %** terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 2.948.200** dengan indicator Programnya adalah Dokumen Kinerja Perangkat Daerah, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100% :

3.31.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3.31.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. **14.907.109.563**, dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. **11.344.466.381** Atau dengan persentase sebesar **80,02 %** terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 2.833.107.390** dengan indicator Programnya adalah Periode Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

3.31.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. **24.280.000**, dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. **24.277.500** Atau dengan persentase sebesar **99,99 %** terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 2.500** dengan indicator Programnya adalah Periode penyediaan jasa administrasi keuangan, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

3.31.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. **19.689.000**, dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. **16.810.000** Atau dengan persentase sebesar **85,38 %** terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 2.879.000** dengan indicator Programnya adalah Jumlah Laporan

Rencana Kerja Tahun 2022

Keuangan dan Bulanan/Semesteran, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

3.31.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

3.31.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. **2.194.550**, dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. **16.810.000** Atau dengan persentase sebesar **85,38 %** terdapat sisa anggaran sebesar Rp. **2.879.000** dengan indicator Programnya adalah Jumlah Laporan Keuangan dan Bulanan/Semesteran, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

3.31.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

3.31.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. **6.671.250**, dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. **4.400.000** Atau dengan persentase sebesar **65,95 %** terdapat sisa anggaran sebesar Rp. **2.271.250** dengan indicator Programnya adalah Jumlah Laporan Kepegawaian, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

3.31.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. **5.948.000**, dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. **5.948.000** Atau dengan persentase sebesar **99,78 %** terdapat sisa anggaran sebesar Rp. **12.800** dengan indicator Programnya adalah Jumlah Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis yang diikuti, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

3.31.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. **49.983.420**, dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. **20.560.000** Atau dengan persentase sebesar **41,13 %** terdapat sisa anggaran sebesar Rp. **29.423.420** dengan indicator Programnya adalah jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis yang diikuti, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

Rencana Kerja Tahun 2022

3.31.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. **115.330.462**, dengan Realisasi anggaran sebesar **Rp. 112.293.735** Atau dengan persentase sebesar **97,37 %** terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 3.036.727** dengan indicator Programnya adalah Periode penyediaan alat tugas kantor, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

3.31.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. **50.534.850**, dengan Realisasi anggaran sebesar **Rp. 20.241.750** Atau dengan persentase sebesar **40,06 %** terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 30.293.100**, dengan indicator Programnya adalah jumlah barang cetak dan penggandaan, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

3.31.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. **5.511.792**, dengan Realisasi anggaran sebesar **Rp. 5.038.000** Atau dengan persentase sebesar **91,40 %** terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 473.792** dengan indicator Programnya adalah jumlah bahan bacaan, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

3.31.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. **404.603.800**, dengan Realisasi anggaran sebesar **Rp. 352.907.762** Atau dengan persentase sebesar **87,22 %** terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 51.696.038** dengan indicator Programnya adalah Jumlah Peserta Rapat, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

3.31.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

3.31.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. **318.372.186**, dengan Realisasi anggaran sebesar **Rp. 287.375.000** Atau dengan persentase sebesar **90,26 %** terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 30.997.186** dengan indicator Programnya adalah Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

Rencana Kerja Tahun 2022

3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.31.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. **66.600.000**, dengan Realisasi anggaran sebesar **Rp. 65.700.000** Atau dengan persentase sebesar **98,65 %** terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 900.000** dengan indicator Programnya adalah jumlah surat keluar pertahun, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

3.31.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. **249.672.000**, dengan Realisasi anggaran sebesar **Rp. 202.398.716** dengan persentase sebesar **81,07 %** terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 47.273.284** dengan indicator Programnya adalah periode pembayarn rekening listrik, telepon dan PAM, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

3.31.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. **116.378.478,,** dengan Realisasi anggaran sebesar **Rp. 114.028.600** Atau dengan persentase sebesar **99,98 %** terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 2.349.878** dengan indicator Programnya adalah periode pemakaian jasa kebersihan kantor, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3.31.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

3.31.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. **322.147.560,,** dengan Realisasi anggaran sebesar **Rp. 299.396.250** Atau dengan persentase sebesar **92,94 %** terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 22.751.310** dengan indicator Programnya adalah Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapangedung kantor, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

3.31.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Rencana Kerja Tahun 2022

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 72.036.824, dengan Realisasi anggaran sebesar **Rp. 71.708.500** Atau dengan persentase sebesar **99,54 %** terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 328.324** dengan indicator Programnya Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

VIII. 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi

3.31.02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 1.351.312.084, dengan Realisasi anggaran sebesar **Rp. 1.215.081.251** Atau dengan persentase sebesar **89,92 %** terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 136.230.833** dengan indicator Programnya adalah Jumlah Pelaku Usaha dan atau Aparat yang dilatih, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

3.31.02.1.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 3.936.827.182, dengan Realisasi anggaran sebesar **Rp. 3.880.576.784** Atau dengan persentase sebesar **98,57 %** terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 56.250.398** dengan indicator Programnya adalah Jumlah Bantuan Mesin/Peralatan bagi IKM, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

3.31.02.1.01.06 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 105.137.160, dengan Realisasi anggaran sebesar **Rp. 99.976.134** Atau dengan persentase sebesar **95,09 %** terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 5.161.026** dengan indicator Programnya adalah Jumlah evaluasi RPIK yang dilaksanakan, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

IX. 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

Rencana Kerja Tahun 2022

3.31.03.1.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi

3.31.03.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 118.627.260 , dengan Realisasi anggaran sebesar **Rp. 103.367.049** Atau dengan persentase sebesar **87,14 %** terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 15.260.211** dengan indicator Programnya adalah Jumlah Perusahaan yang diawasi, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

X. 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

3.31.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

3.31.04.1.01.01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 111.278.000,, dengan Realisasi anggaran sebesar **Rp. 84.376.100** Atau dengan persentase sebesar **75,82 %** terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 26.901.900** dengan indicator Programnya adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan IKM, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

3.31.04.1.01.02 Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas

Terdiri Dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 104.319.000, dengan Realisasi anggaran sebesar **Rp. 81.681.800** Atau dengan persentase sebesar **78,30 %** terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 22.637.200** dengan indicator Programnya adalah Jumlah Diseminasi dan Publikasi, capaian Indikator Program berdasarkan Realisasi berbanding target sebesar 100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi sebagai lembaga teknis pelaksana, dituntut untuk mampu berperan sebagai pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang Industri dan Perdagangan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi:

2.2.1 Tugas

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi. Sebagaimana Pasal 3, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan dibidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perindustrian dan perdagangan.

2.2.2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi menyelenggarakan *fungsi sesuai Pasal 4* yaitu :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Perindustrian dan Perdagangan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan Umum dibidang Perindustrian dan Perdagangan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perindustrian dan Perdagangan.
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 40 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dan dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Daerah Provinsi Jambi.

Dilihat dari alokasi anggaran yang tersedia baik anggaran **belanja langsung dan belanja tidak langsung** yang tercatat sebesar Rp. **24.892.670.182,-** terealisasi Rp. **20.758.525.898,00,-**/83,39% target fisik 100% realisasi fisik 95%, sementara untuk realisasi keuangan dibandingkan target masih ada selisih minus 16,61%. Khusus untuk **belanja tidak langsung** total pagu Rp. **9.985.560.619,00,-** terealisasi sebesar Rp. **9.414.059.517,00,-** atau 94,28%, sementara fisik tercatat 100% sama dengan target. Sedangkan untuk **belanja langsung** dengan total pagu yang tercatat sebesar Rp. **10.011.600.619,00,-** terealisasi Rp. **9.439.604.429,00,-**/94,29%, target fisik 100% realisasi fisik 95%, sementara untuk realisasi keuangan dibandingkan target masih ada selisih minus 5,71%. Khusus untuk dibandingkan dengan target. Pagu anggaran pada tahun 2021 mengalami perubahan sebagai berikut :

URAIAN BELANJA	APBD	APBD-P	PERUBAHAN	
			Rp.	%
TIDAK LANGSUNG	16.411.261.611,00	15.688.035.819,00	(723.225.792,00)	(18,19)
LANGSUNG	10.405.492.336,00	10.011.600.619,00	(393.891.717,00)	(3,79)
JUMLAH	26.816.753.947,00	25.699.636.438,00	(1.117.117.509,00)	(13,33)

Analisis kinerja pelayanan merupakan analisis terhadap keterkaitan pencapaian **Rencana Kerja Tahun 2023** kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Sesuai dengan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi tahun 2021 – 2026, maka dalam rencana kerja tahun 2023 telah ditetapkan beberapa indikator kinerja capaian program/kegiatan pembangunan.

Target kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi berdasarkan tujuan dan saran yang ingin dicapai pada tahun 2023, dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Target 2023
1	Meningkatkan daya saing industri guna mendukung perekonomian daerah	Tumbuh dan berkembangnya sektor industri	1	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB (%)	8.08
			2	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas (%)	0.43
			3	Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan (orang)	264.755
2	Meningkatkan peran sektor perdagangan untuk mendukung perekonomian daerah	Tumbuh dan berkembangnya perdagangan dalam negeri	1	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)	95
			2	Persentase barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (%)	43,25

			3	Persentase Komoditi Potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (%)	66
			4	Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	92
			5	Tertib Usaha (%)	60
3	Meningkatkan perdagangan luar negeri	Meningkatnya nilai ekspor	1	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Non Migas (USD Miliar)	1.000
			2	Pertumbuhan nilai ekspor non migas (%)	6
4	Meningkatkan pelayanan masyarakat dan dunia usaha	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan eksternal dan internal organisasi	1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi	78
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1	Nilai SAKIP	BB

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

- A. Kinerja Pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD Pelayanan OPD sector Industri diarahkan untuk (1) Peningkatan daya saing produk Industri; (2) pengembangan industri pengolahan; (3) peningkatan dukungan penguatan SDM Industri; (4) pengembangan penguasaan teknologi dan inovasi; (5)

penguatan pasokan bahan baku industri; (6) peningkatan koordinasi lintas sector, pengembangan perwilayahan industri yang inklusif;

Sementara untuk sector perdagangan (1) penyediaan informasi pasar dalam rangka mengatisipasi dinamika perubahan pasar dalam dan luar negeri; (2) peningkatan fasilitasi jaringan produksi, distribusi dan promosi perdagangan antar daerah dalam penciptaan struktur pasar yang efisien dan berdaya saing; (3) optimalisasi pengawasan, pelayanan dan sertifikasi mutu produk; (4) peningkatan efektifitas pengawasan pendaftaran perusahaan secara online.

B. Peluang dan Tantangan

Tantangan dan peluang Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi diuraikan kedalam bidang/UPTD masing-masing sebagai berikut :

1. Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri

Tantangan :

- 1) Relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia Industri yang tercermin dari produktivitas tenaga kerja yang kurang kompetitif dan tingkat kekakuan pasar tenaga kerja yang tinggi;
- 2) Efisiensi logistic dan dukungan industri manufaktur yang belum memadai, menjadikan biaya bahan baku menjadi lebih tinggi;
- 3) Belum tersedianya energy yang cukup untuk menopang transformasi pada industri manufaktur dengan harga yang kompetitif ;
- 4) Kebijakan industri yang belum terintegrasi antar lembaga terkait dan antar pemerintah pusat dan daerah;
- 5) Postur industri di Provinsi Jambi yang tidak berimbang antara industri kecil dan besar yaitu masih didominasi oleh industri kecil menjadikan peran industri kecil dalam rantai indusri manufaktur belum optimal.

Peluang :

- 1) Kebijakan pengembangan Kawasan Industri di Luar Pulau Jawa mendorong Provinsi Jambi untuk menciptakan kawasan Industri dan pemerataan industri.
- 2) Revolusi industri 4.0 menjadikan metode manufaktur yang canggih, mampu mengubah nilai ekonmi dalam produksi;
- 3) Munculnya pasar modern (e-commerce) atau pemasaran online mendorong membuka pasar global;
- 4) Tumbuhnya industri kreatif aneka menciptakan wirausaha baru dan tenaga kerja baru.

2. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri

Tantangan

- 1) Agro industri mengolah hasil pertanian dan perkebunan sehingga tingkat ketergantungan sector ini relative rendah terhadap bahan baku atau modal maupun capital dari luar negeri dan impor;

- 2) Memiliki tingkat keuntungan yang tinggi karena menghasilkan produk bernilai ekonomi tinggi dan selalu dibutuhkan oleh masyarakat;
- 3) Agro Industri memiliki sustainabilitas yang tinggi dengan pola penerapan yang tepat baik secara mandiri maupun dengan kemitraan;
- 4) Industri Menengah Besar secara makro melibatkan Tenaga Kerja dalam Jumlah yang sangat besar antara lain petani, peternak, nelayan dan masyarakat luas di pedesaan;
- 5) Input bagi agroindustri pada umumnya merupakan bahan alamiah yang dapat diperbaharui sehingga ramah terhadap lingkungan;
- 6) Sebagai salah satu penghasil Komoditi Karet dan Sawit Provinsi Jambi dituntut untuk menciptakan produk-produk Industri Hilirisasi dari karet dan Sawit dan komoditi lainnya.

Peluang

- 1) Potensi permintaan produk-produk hilirisasi komoditas agro semakin besar sejalan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi, social, budaya dan arus globalisasi.
- 2) Perubahan lingkungan strategis dari sisi permintaan seperti pertambahan penduduk, pertumbuhan perkotaan dan industrialisasi merupakan peluang usaha untuk peningkatan nilai tambah.
- 3) Relokasi unit-unit produksi ke Negara-negara berkembang termasuk Indonesia
- 4) Program Aspal Karet dan Biodisel B30 dapat meningkatkan nilai tambah petani karet dan meningkatkan ketahanan dan kemandirian energy serta stabilisasi harga CPO.

3. Bidang Pengembangan Perdagangan

Tantangan

- 1) Produk Kebutuhan Pokok Masyarakat dalam negeri belum diketahui peta lokasi, volume dan masa panen;
- 2) Persaingan perdagangan didalam negeri belum sehat;
- 3) Makin gencarnya isu lingkungan yakni adanya tuntutan Negara maju agar produk yang masuk ke negaranya tidak merusak lingkungan;
- 4) Adanya tuntutan pasar terhadap kualitas barang yang harus memenuhi standar Internasional (Negara tujuan ekspor);
- 5) Masih banyaknya pelaku usaha yang melakukan ekspor belum melalui pelabuhan-pelabuhan yang ada di Provinsi Jambi;
- 6) Belum lancarnya lalu lintas perdagangan antar pulau dari wilayah/daerah pemasok ke provinsi Jambi.

Peluang

- 1) Pelabuhan Ujung Jabung dan Kawasan Ekonomi Khusus Kemingking masuk kedalam Prioritas Nasional yang akan meningkatkan jalur distribusi komoditi ekspor dan perdagangan antar pulau.

- 2) Rencana Implementasi proyek IMT-GT Bussines Center Indonesia ditujukan untuk memfasilitasi aktivitas dan networking pelaku usah adaerah, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing industry.
- 3) Adanya keinginan yang kuat diantara stakeholder di bidang ekspor di Provinsi Jambi untuk meningkatkan ekspor non migas melalui pelabuhan di Provinsi Jambi.

4. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Tantangan

- 1) Banyaknya arus masuk produ-produk barang dan jasa diperlukan pengawasan yang lebih intensif terkait produk-produk impor dan local yang sesuai SNI dan persyaratan teknis lainnya (Label dan MKG berbahasa Indonesia);
- 2) Belum adanya system perlindungan konsumen yang terintegrasi dan masih rendahnya kapasitas/kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan perlindungan konsumen;
- 3) Belum semua Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang memiliki Badan Penyelesaian sengketa Konsumen;
- 4) Upaya pengawasan dan penengakan hokum yang harus lebih konkrit dan hasilnya dapat dirasakan masyarakat, termasuk oleh pelaku usaha dan konsumen.

Peluang

- 1) Ketentuan produk ekspor ber SNI akan memacu pelaku usaha/IKM untuk memperoleh sertifikasi terkait HKI dan SNI atas barang yang diproduksinya.
- 2) Regulasi/kebijakan perdagangan yang mempermudah investasi dan perizinan berusaha;
- 3) Dukungan anggaran guna tersusunya Standar Pelayanan Minimum (SPM) pemerintah daerah bagi pelaksanaan bidang perlindungan konsumen (pemberdayaan konsumen, pengawasan barang beredar, dan Tertib Niaga)

5. UPTD Balai Sertifikasi Mutu Barang

Tantangan

- 1) Semakin banyaknya pendirian laborarotium penguji dan kalibrasi terutama swasta sehingga membuat ketatnya persaingan dalam menarik minat masyarakat;
- 2) Pesatnya perkembangan IPTEK BPSMB dituntut memiliki metode dan peralatan yang mutakhir.

Peluang

- 1) Bertambahnya jenis komoditi yang diberlakukan SNI secara wajib;
- 2) Meningkatnya permintaan dunia industry maupun sector usaha lainnya untuk memastikan jaminan mutu produk dan alatnya;
- 3) Adanya regulasi pemerintah yang dapat membuka peluang bagi BPSMB dalam mengembangkan pelayanannya;
- 4) Kemajuan teknologi informasi dalam hal menunjang kelancaran komunikasi dan upaya pengembangan pengetahuan;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan atas program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2020, maka hasil review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2020 dapat dijelaskan dalam table berikut :

a. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2021 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. RENJA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021.

Dalam konteks perencanaan pembangunan sektor industri dan perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain dalam era globalisasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dituntut untuk siap dan sanggup membuat atau menyusun perencanaan yang baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

a. URUSAN PERINDUSTRIAN

Program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan usulan dan kebutuhan masyarakat melalui proses Musrenbang sesuai dengan tahapan serta dengan mencermati program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Renstra SKPD. Tahapan selanjutnya adalah perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan monitoring yang menurut aturan dan ketentuan termasuk kemungkinan pelibatan unsur/pihak ketiga termasuk jasa konsultasi serta rekanan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perkembangan sektor industri dilaksanakan dengan tujuan memperkuat struktur ekonomi daerah, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, penguatan dan pendalaman struktur industri yang terkait dengan agro industri, industri kecil dan menengah serta industri kerajinan dan rumah tangga dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada untuk menghasilkan nilai tambah barang dan jasa yang berorientasi pada pasar dalam dan luar negeri. Pelaksanaan pembangunan tersebut dilakukan dengan

mengutamakan keberpihakan pada masyarakat dan memperkuat keterkaitan serta saling mendukung antara industri dan pertanian yang ditunjang dengan sektor jasa dan kualitas SDM. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan pengembangan industri dapat lebih efisien dengan wawasan kemasa depan yang dapat menghasilkan produk yang berkualitas dandaya saing tinggi.

b. URUSAN PERDAGANGAN

Program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan usulan dan kebutuhan masyarakat melalui proses Musrenbang sesuai dengan tahapan serta dengan mencermati program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Renstra SKPD. Tahapan selanjutnya adalah perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan monitoring yang menurut aturan dan ketentuan termasuk kemungkinan pelibatan unsur/pihak ketiga termasuk jasa konsultasi serta rekanan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Program pengembangan perdagangan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan sistem perdagangan dalam negeri yang efisien, perlindungan terhadap konsumen dan pengembangan perdagangan luar negeri dalam rangka peningkatan ekspor serta pengendalian impor, tujuan ini sangat erat hubungannya dengan upaya memperkuat pematapan struktur ekonomi daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Tema Pembangunan Nasional yang direncanakan akan ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah ***“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”***. Adapun prioritas pembangunan diarahkan untuk :

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta
7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Tema tersebut berfokus pada dua hal yaitu **Pemulihan Ekonomi** dan **Reformasi Struktural**. Pemulihan Ekonomi dapat diterjemahkan sebagai upaya pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha serta diversifikasi ekonomi. Pemulihan daya beli dan usaha yang dilakukan sejalan dengan penuntasan krisis kesehatan, dilakukan melalui pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga, serta percepatan pembangunan infrastruktur padat karya. Selain itu, dilakukan juga program-program khusus untuk mendongkrak kembali daya beli masyarakat dan membangkitkan dunia usaha. Pada saat bersamaan, diversifikasi ekonomi dilakukan melalui program peningkatan nilai tambah, ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, serta pemerataan infrastruktur dan kualitas layanan digital.

3.1.1. Kementerian Perdagangan

Visi Kementerian Perdagangan RI adalah **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Misi Kementerian Perdagangan adalah :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Arah kebijakan kementerian perdagangan dalam pembangunan sektor perdagangan adalah :

1. Mengamankan pangsa ekspor di pasar utama
2. Memperluas Pangsa Pasar Ekspor di Pasar Prospektif dan Hub Perdagangan Internasional
3. Meningkatkan Diversifikasi Produk Ekspor
4. Mengamankan Pasar Domestik Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Nasional
5. Meningkatkan Kontribusi Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM)
6. Meningkatkan Perlindungan konsumen
7. Meningkatkan Efisiensi Sistem Distribusi & Logistik
8. Meningkatkan Fasilitasi dan Iklim Usaha Perdagangan

3.1.2. Kementerian Perindustrian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 menyatakan bahwa Visi Pembangunan Industri Nasional adalah Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh. Industri Tangguh bercirikan: struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan; industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengemban misi sebagai berikut: meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional; memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional; meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau; menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat; membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut: mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam; melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi; meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri; menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI); mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri kecil dan industri menengah; menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah; melakukan pembangunan sarana dan prasarana Industri; melakukan pembangunan industri hijau; melakukan pembangunan industri strategis; melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan meningkatkan kerjasama internasional bidang industri. Sasaran pembangunan sektor industri yang dicapai pada tahun 2015-2035 seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1 Sasaran Pembangunan Industri Tahun 2015 s.d. 2035 (persen)

No	Indikator Pembangunan Industri	Satuan	2015	2020	2025	2035
1	Pertumbuhan sektor industri nonmigas	%	6,8	8,5	9,1	10,5
2	Kontribusi industri nonmigas terhadap PDB	%	21,2	24,9	27,4	30,0
3	Kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor	%	67,3	69,8	73,5	78,4
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri	juta orang	15,5	18,5	21,7	29,2
5	Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja	%	14,1	15,7	17,6	22,0
6	Rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri nonmigas	%	43,1	26,9	23,0	20,0
7	Nilai Investasi sektor industri	Rp triliun	270	618	1.000	4.150
8	Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Pulau Jawa	%	27,7	29,9	33,9	40,0

Sumber: Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional

Penetapan capaian pembangunan industri prioritas dilakukan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), tahapan dan arah rencana pembangunan industri nasional diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap I (2015-2019)

Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.

2. Tahap II (2020-2024)

Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas.

3. Tahap III (2025-2035)

Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Industri Tangguh yang bercirikan

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023

struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pemerintah Provinsi Jambi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di pada satu tahun mendatang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi.

A. TUJUAN

Adapun tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu strategis bidang perindustrian dan perdagangan Provinsi Jambi dan permasalahan-permasalahan bidang perindustrian dan perdagangan Provinsi Jambi. Berdasarkan isu-isu strategis dan permasalahan-permasalahan bidang perindustrian dan perdagangan Provinsi Jambi maka ditetapkan tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya saing industri guna mendukung perekonomian daerah;
2. Meningkatkan peran sektor perdagangan untuk mendukung perekonomian daerah;
3. Meningkatkan perdagangan luar negeri;
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat dan dunia usaha
5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas

B. SASARAN

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan diatas, maka perlu dirumuskan sasaran-sasaran yang sifatnya kuantitatif sehingga mudah untuk diukur keberhasilan pencapaiannya. Adapun sasaran pembangunan sektor industri dan perdagangan yang ingin diwujudkan sebagaimana yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan. Untuk mewujudkan tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi tahun

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023

2021-2026 yang telah ditetapkan, maka disusunlah sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan tujuan meningkatkan daya saing industri guna mendukung perekonomian daerah, ditetapkan sasaran berupa tumbuh dan berkembangnya sektor industri dengan indikator sasaran adalah :
 - a. Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB (%)
 - b. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas (%)
 - c. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan (orang)
2. Untuk mewujudkan tujuan meningkatkan peran sektor perdagangan untuk mendukung perekonomian daerah, ditetapkan sasaran berupa tumbuh dan berkembangnya perdagangan dalam negeri dengan indikator sasaran adalah :
 - a. Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)
 - b. Persentase barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (%)
 - c. Persentase Komoditi Potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (%)
 - d. Persentase kinerja realisasi pupuk (%)
 - e. Tertib Usaha (%)
3. Untuk mewujudkan tujuan meningkatkan perdagangan luar negeri, ditetapkan sasaran berupa meningkatnya nilai ekspor dengan indikator sasaran adalah :
 - a. Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Non Migas (USD Miliar)
 - b. Pertumbuhan nilai ekspor non migas (%)
4. Untuk mewujudkan tujuan meningkatkan pelayanan masyarakat dan dunia usaha, ditetapkan sasaran berupa meningkatnya kualitas kinerja pelayanan eksternal dan internal dengan indikator sasaran adalah :
 - a. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
5. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas,

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023

ditetapkan sasaran berupa terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator sasaran adalah :

a. Nilai SAKIP

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi melalui program/kegiatannya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut ini.

Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target
1	Meningkatkan daya saing industri guna mendukung perekonomian daerah	Tumbuh dan berkembangnya sektor industri	1 Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB (%)	7,65	8.08
			2 Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas (%)	0,35	0.43
			3 Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan (orang)	329.124	264.755
2	Meningkatkan peran sektor perdagangan untuk mendukung perekonomian daerah	Tumbuh dan berkembangnya perdagangan dalam negeri	1 Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)	82,50	95,00
			2 Persentase barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (%)	12,09	43,25
			3 Persentase Komoditi Potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (%)	60,00	66,00
			4 Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	90,00	92,00
			5 Tertib Usaha (%)	NA	60,00
3	Meningkatkan perdagangan luar negeri	Meningkatnya nilai ekspor	1 Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Non Migas (USD Miliar)	0,934	1,000

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target
			2	Pertumbuhan nilai ekspor non migas (%)	-19,15	6,0
4	Meningkatkan pelayanan masyarakat dan dunia usaha	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan eksternal dan internal organisasi	1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi	76,81	78,00
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1	Nilai SAKIP	B	BB

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023

3.3. Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

Tujuan	Sasaran	Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
										Kinerja	indikator	satuan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target						
		3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
		3	30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								30.106.842.879							
		3	30	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								22.197.769.902							
		3	30	01	1,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								751.678.000							
Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	3	30	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen	Tersusunnya Dokumen	Jumlah Dokumen	Dokumen	Semua	BB	6 Dokumen	100 persen	287.734.000	PENDAPA		Predikat AKIP	BB Predikat	330.894.100	
							Perencanaan Perangkat	Perencanaan	Perencanaan	Kab/Kota,	Predikat	6 Dokumen				TAN ASLI		Perangkat			
							Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Semua		1 Kali				DAERAH		Daerah			
										Kecamatan,		12 Bulan				(PAD)					
										Semua											
										Kelurahan											

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023

						330011,0102	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	6Dokumen	100 persen		PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	38.500.000
						330011,0106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	6dokumen	100 persen	29.877.162			Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	34.358.736

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023

							Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			3	30	01	1,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	1dokumen 4Laporan	100 persen	60.452.850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	69.520.778	
			3	30	01	1,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									15.897.164.495					12.936.770.942
			3	30	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	0 Orang/ Bulan 14 Bulan	100 Persen	12.401.505.797	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	12.711.543.442	

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023

								ASN											
		3	30	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	12 Dokumen 12 Bulan	100 Persen	155.850.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	179.227.500

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RENJA DISPERINDAG PROVINSI JAMBI

Pada tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah, dengan memperhatikan pencapaian target kinerja urusan perdagangan dan urusan perindustrian tahun 2023 telah merencanakan program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.


4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2023 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 adalah sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1 Rencana Program Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas							
														Nasional	Daerah						
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						6,139,327,569								6,749,793,167		
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						875,300,000							900,000,000			
3	30	02	1.01		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor						200,000,000							170,000,000			
3	30	02	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB Bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	jumlah dokumen SIUP MB Toko bebas jumlah sosialisasi kebijakan permendag tentang SIUP MB				3 Dokumen 1 kali	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi	0	3 Dokumen 1 kali	170,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
3	30	02	1.02		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi						440,000,000							440,000,000			
3	30	02	1.02	01	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah perusahaan yang difasilitasi perizinannya melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik				3 Dokumen	120,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi	0	3 Dokumen	120,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
3	30	02	1.02	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi komitmen SIUP B2 Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik jumlah sosialisasi kebijakan permendag tentang SIUP B2				3 Dokumen 1 kali	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi	0	3 Dokumen 1 kali	200,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
3	30	02	1.02	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pemeriksaan sarana Distribusi bahan bebahaya				6 kali	120,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi	0	6 kali	120,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	02	1.03		Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar						44,500,000								
3	30	02	1.03	02	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya				4 gudang	44,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi	0	4 gudang	49,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	02	1.04		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)						190,800,000							241,000,000	
3	30	02	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Kesepakatan forum koordinasi Ekspor Jumlah perusahaan yang diberikan pelayanan SKA Jumlah Peserta Forum Koordinasi Ekspor				1 dokumen 100 perusahaan 100 orang	180,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				0	1 dokumen 100 perusahaan 100 orang	216,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	02	1.04	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan API melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah fasilitas penertiban API				2 kali	10,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi	0	2 kali	25,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						34,472,900							37,920,190	
3	30	03	1.01		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas						34,472,900							37,920,190	
3	30	03	1.01	03	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah fasilitasi pendampingan pelaksanaan lelang agro Jumlah peserta pelatihan pengawasan verifikasi mutu				2 kali 30 orang	34,472,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi		2 kali 30 orang	37,920,190	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						1,288,500,000							1,301,100,000	
3	30	04	1.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi						280,000,000							280,000,000	


Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
3	30	04	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah peserta pelatihan pengawasan verifikator mutu Jumlah sosialisasi pelaku usaha terhadap ketersediaan barang pokok di tingkat Distributor dan sub distributor				11 Kab/Kota 100 orang	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi			11 Kab/Kota 100 orang	150,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	04	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah pemantauan ketersediaan barang penting ditingkat distributor dan sub distributor Jumlah sosialisasi pelaku usaha terhadap ketersediaan barang penting di tingkat Distributor dan sub distributor				6 kali 50 orang	130,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi			6 kali 50 orang	130,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	04	1.02		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan						780,000,000								780,000,000	
3	30	04	1.02	02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	jumlah operasi pasar jumlah pendistribusian semako pasar murah				11 kali 11000 paket	780,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1 - Pembangunan Ekonomi	0		11 kali 11000 paket	780,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	04	1.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya						228,500,000								241,100,000	
3	30	04	1.03	01	Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi	jumlah izin perdagangan pupuk dan pestisida yang disupervisi				6 perusahaan	82,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi	0		6 perusahaan	90,200,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	04	1.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	jumlah pengawasan,penyaluran,dan penggunaan pupuk bersubsidi				11 kali	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi	0	11 kali	100,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	04	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	jumlah distributor yang diawasi				4 distributor	46,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi	0	4 distributor	50,900,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						1,070,000,000							1,284,000,000	
3	30	05	1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi						1,070,000,000							1,284,000,000	
3	30	05	1.01	01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	jumlah pameran dagang yang diikuti jumlah produk ekspor/IKM yang mengikuti pameran dagang				2 kali 6 produk	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi	0	2 kali 6 produk	600,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	05	1.01	02	Pameran Dagang Lokal	jumlah pameran dagang dalam provinsi jumlah produk ekspor/IKM yang mengikuti pameran dagang lokal				1 kali 3 produk	180,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi	0	1 kali 3 produk	216,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	05	1.01	04	Peningkatan Citra Produk Ekspor	jumlah kegiatan peningkatan citra produk ekspor				2 kegiatan	180,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi	0	2 kegiatan	216,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	05	1.01	05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	jumlah pelaku usaha ekspor jumlah pelatihan ekspor				100 orang 2 kali	210,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi	0	100 orang 2 kali	252,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						2,406,964,456							2,512,124,508	
3	30	06	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						831,000,000							847,084,990	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	06	1.01	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	jumlah BPSK yang dibentuk jumlah sosialisasi kebijakan perlindungan konsumen				1 BPSK 3 kali	356,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi	0	1 BPSK 3 kali	336,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06	1.01	02	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	jumlah kesepakatan dengan lembaga perlindungan konsumen				2 kali	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi	0	2 kali	110,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	jumlah fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen				40 sidang	375,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 - Pembangunan Ekonomi	0	40 sidang	401,084,990	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06	1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						1,318,105,756							1,381,394,948	
3	30	06	1.02	01	Verifikasi Mutu Produk	jumlah verifikasi mutu produk				44 produk	136,791,368	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi	0	44 produk	157,310,074	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06	1.02	02	Pengembangan Layanan Pengujian	jumlah jasa layanan pengujian				2509 parameter	753,609,528	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi	0	2509 parameter	753,609,528	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06	1.02	03	Pengembangan Layanan Sertifikasi	jumlah bimbingan atau pendampingan pembentukan lembaga sertifikasi produk(LSPro)				4 tahapan	107,337,780	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi	0	4 tahapan	118,071,558	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06	1.02	04	Pengembangan Layanan Kalibrasi	jumlah alat standar lab.kalibrasi yang terkalibrasi jumlah jasa pelayanan kalibrasi alat jumlah sosialisai lab.kalibrasi UPTD BPSMB				15 jenis 509 alat 11 kab/kota	320,367,080	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi	0	15 jenis 509 alat 11 kab/kota	352,403,788	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						257,858,700							283,644,570	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	06	1.03	01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	jumlah barang dan jasa yang diawasi jumlah sample produk yang diuji				9 produk 9 sampel	257,858,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi	0	9 produk 9 sampel	283,644,570	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						464,090,213							714,648,469	
3	30	07	1.01		Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri						320,590,213							556,798,469	
3	30	07	1.01	01	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	jumlah misi dagang dan temu usaha UMKM dalam negeri jumlah pameran dalam negeri yang diikuti jumlah partisipasi pawai kendaraan hias jumlah pelaku usaha yang difasilitasi mengikuti pameran jumlah peserta sosialisasi penggunaan produk dalam negeri				9 orang 2 kali 1 kali 6 oran 100 orang	320,590,213	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	9 orang 2 kali 1 kali 6 oran 100 orang	556,798,469	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	07	1.02		Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri						85,000,000							93,500,000	
3	30	07	1.02	01	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	jumlah dokumen MOU jumlah kunjungan ke perusahaan jumlah temu usaha kemitraan				10 MOU 5 perusahaan 1 kali	85,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi		10 MOU 5 perusahaan 1 kali	93,500,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	07	1.03		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri						58,500,000							64,350,000	
3	30	07	1.03	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	jumlah dokumen produk unggulan daerah jumlah kab/kota yang dikunjungi				2 dokumen 11 kab/kota	58,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi		2 dokumen 11 kab/kota	64,350,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						26,743,150,336							27,541,115,823	
3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						19,136,974,226							19,644,322,102	
3	31	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						265,000,000							291,500,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	31	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah				6 dokumen	210,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi	0	<div><div></div></div> 6 dokumen	<div><div></div></div> 231,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen kinerja perangkat daerah periode evaluasi kinerja perangkat daerah				2 dokumen 12 bulan	55,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi	0	2 dokumen 12 bulan	60,500,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						15,493,771,402							15,897,164,495	
3	31	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	periode penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 bulan	15,279,787,302	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 - Pembangunan Ekonomi		14 bulan	15,661,781,985	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	periode penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	165,187,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi		12 bulan	181,705,700	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan dan bulanan/semesteran				5 dokumen	48,797,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi		5 dokumen	53,676,810	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						30,000,000							35,000,000	
3	31	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan barang milik daerah				3 dokumen	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi		3 dokumen	35,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						269,642,700							292,381,850	
3	31	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya				165 stell	107,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi		165 stell	113,750,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	jumlah laporan kepegawaian				5 dokumen	50,259,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi		5 dokumen	55,285,750	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
3	31	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis yang diikuti				30 orang/kali	112,132,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi			30 orang/kali	123,346,100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						1,007,265,650							1,090,866,150		
3	31	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor				20 jenis	57,480,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi		20 jenis	66,103,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	31	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	periode penyediaan alat tugas kantor				12 bulan	126,863,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi		12 bulan	139,549,800	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	31	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggunaan				5 item	55,588,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi		5 item	61,147,100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	31	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan				60 eksemplar	13,322,950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi		60 eksemplar	14,655,250	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	31	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah peserta rapat jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang diikuti				580 orang 168 orang/kali	554,010,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi		580 orang 168 orang/kali	609,411,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	31	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang didukung periode penyampaian informasi melalui website dan sosial media				5 aplikasi 12 bulan	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi		5 aplikasi 12 bulan	200,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	31	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						563,425,000							160,000,000		
3	31	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan roda 4/2				3 unit	435,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi		3 unit	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	31	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	jumlah mebel				3 unit	7,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi		3 unit	5,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pengadaan peralatan gedung kantor				3 item	20,625,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi		3 item	55,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah pengadaan rehab sarana dan prasarana gedung kantor				1 paket	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi		1 paket	100,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						557,081,200							612,788,000	
3	31	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat keluar pertahun				3500 surat	80,968,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi		3500 surat	89,065,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	periode pembayaran rekening listrik,telepon danPDAM				12 bulan	348,097,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi		12 bulan	382,906,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	periode pemakaian jasa kebersihan kantor				12 bulan	128,016,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi		12 bulan	140,817,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						950,788,274							1,264,621,607	
3	31	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah pemeliharaan kendaraan/operasional roda 4 dan roda 2				25 unit	348,187,560	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi		25 unit	348,187,560	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah pemeliharaan kendaraan/operasional roda 4 dan roda 2				5 unit	69,637,510	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi		5 unit	69,637,510	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	31	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	jumlah pemeliharaan mebel				5 unit	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi		5 unit	25,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				20 unit	100,463,204	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi		20 unit	100,463,204	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				3 paket	281,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi		3 paket	468,333,333	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor				1 paket	126,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi		1 paket	253,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						6,706,176,110							7,036,793,721	
3	31	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi						6,706,176,110							7,036,793,721	
3	31	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	jumlah revisi RPIP				1 dokumen	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi	0	1 dokumen	150,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi				2 kali	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi	0	2 kali	275,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	02	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	jumlah pelaku usaha yang dilatih jumlah pelatihan/bantuan alat bagi industri menengah besar				20 orang 3 pelatihan	700,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi	0	20 orang 3 pelatihan	720,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	02	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi				2 kali	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi	0	2 kali	275,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	31	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	jumlah bantuan mesin/peralatan bagi IKM jumlah bimbingan teknis pengolahan limbah industri jumlah IKM yang diasilitasi mengikuti pameran jumlah lomba kegiatan pengembangan desain berbasis budaya jumlah promosi IKM yang diikuti jumlah rapat koordinasi dewan kerajinan nasional daerah jumlah studi tiru kegiatan pengembangan desain berbasis budaya daerah periode fasilitasi pengembangan unit promosi				3 paket 3 kali 15 IKM 1 kali 6 kali 1 kali 2 kali 12 bulan	4,906,176,110	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi	0	3 paket 3 kali 15 IKM 1 kali 6 kali 1 kali 2 kali 12 bulan	5,396,793,721	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	02	1.01	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	jumlah evaluasi RPIK yang dilaksanakan jumlah laporan evaluasi				11 kab/kota 11 laporan	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi	0	11 kab/kota 11 laporan	220,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI						250,000,000							270,000,000	
3	31	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi						250,000,000							270,000,000	
3	31	03	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	jumlah perusahaan yang diawasi jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan/dikeluarkan				30 perusahaan 2 rekomendasi	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi	0	30 perusahaan 2 rekomendasi	270,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						650,000,000							590,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	31	04	1.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)						650,000,000						590,000,000		
3	31	04	1.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	jumlah dokumen hasil pendataan IKM				1 dokumen	275,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi	0	1 dokumen	300,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	04	1.01	02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	jumlah diseminasi dan publikasi				2 kali	125,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 - Pembangunan Ekonomi	0	2 kali	15,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	04	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	jumlah pemantauan kepatuhan perusahaan industri				2 kali	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi	0	2 kali	275,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						1,318,105,756							1,381,394,948	
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						1,318,105,756							1,381,394,948	
3	30	06	1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						1,318,105,756							1,381,394,948	
3	30	06	1.02	01	Verifikasi Mutu Produk						136,791,368		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 - Pembangunan Ekonomi			157,310,074	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06	1.02	02	Pengembangan Layanan Pengujian						753,609,528							753,609,528	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06	1.02	03	Pengembangan Layanan Sertifikasi						107,337,780							118,071,558	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06	1.02	04	Pengembangan Layanan Kalibrasi						320,367,080							352,403,788	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						861,500,000							903,700,000	
3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						861,500,000							903,700,000	
3	31	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						156,000,000							170,000,000	
3	31	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						156,000,000							170,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	31	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						126,000,000					<div><div></div></div>	130,000,000		
3	31	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						126,000,000						130,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	31	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						100,000,000						105,000,000		
3	31	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						5,000,000						5,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	31	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						30,000,000						30,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	31	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5,000,000						5,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	31	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						5,000,000						5,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	31	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						55,000,000						60,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	31	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						6,000,000						20,000,000		
3	31	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						6,000,000						20,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	31	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						123,500,000						128,700,000		
3	31	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3,500,000						3,700,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	31	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						70,000,000						75,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	31	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						50,000,000						50,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	31	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						350,000,000						350,000,000		
3	31	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						25,000,000						25,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
3	31	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						25,000,000						25,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
3	31	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50,000,000						50,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
3	31	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						250,000,000						250,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
TOTAL											35,062,083,661								36,576,003,938	

BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang at a Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2023, Dalam proses penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) Tahun Anggaran 2023, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD dan Rencana Strategis (RENSTRA).

Selain target RPJMD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU), yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB (%)
2. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas (%)
3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan (orang)
4. Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)
5. Persentase barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (%)
6. Persentase Komoditi Potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (%)
7. Persentase kinerja realisasi pupuk (%)
8. Tertib Usaha (%)
9. Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Non Migas (USD Miliar)
10. Pertumbuhan nilai ekspor non migas (%)

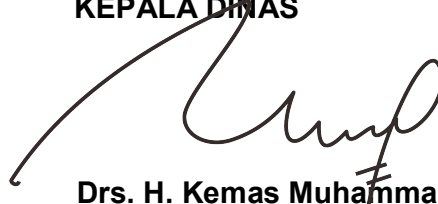
Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023

11. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

12. Nilai SAKIP

Dalam mewujudkan kinerja tersebut diperlukan dukungan dalam hal ketersediaan anggaran kegiatan. Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi ini merupakan masukan utama untuk penetapan rencana kegiatan yang dibiayai dari APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023. Semoga Rencana Kerja ini dapat direalisasikan oleh seluruh jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

Jambi, 2023
KEPALA DINAS



Drs. H. Kemas Muhammad Fuad, MSI
Pembina Utama Muda
NIP. 19721212 199302 1 001